**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dipaparkan teori-teori yang digunakan dan menjadi landasan dan referensi dalam penulisan penelitian ini, serta akan dijelaskan teori mengenai auditing dan juga variabel-variabel yang menjadi objek dalam penelitian ini.

1. **Landasan Teoritis**
2. **Audit**
3. **Pengertian Audit**

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:2), pengertian auditing adalah sebagai berikut:

“Pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang independen.”

Sedangkan definisi auditing menurut Mulyadi (2014:9) adalah sebagai berikut:

“Suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses yang sistematik untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti secara objektif, dengan tujuan untuk menetapkan dan melaporkan kesesuaian antara informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, dan audit harus dilakukan oleh orang yang independen dan kompeten.

1. **Tujuan Audit**

Menurut Arens, Elder, dan Beasley (2015:168), tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

1. **Jenis Audit**

Arens, Elder, dan Beasley (2015:12) menyatakan terdapat tiga jenis utama audit, yaitu:

1. Audit Operasional

Audit operasional mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan rekomendasi untuk memperbaiki operasi.

1. Audit Ketaatan

Auditor ketaatan dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.

1. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah standar akuntansi A.S. atau internasional.

1. **Jenis Auditor**

Arens, Elder, dan Beasley (2015:19) menyatakan 5 jenis auditor yang dikenal secara umum, yaitu kantor akuntan publik, auditor internal pemerintah, auditor badan pemeriksa keuangan, auditor pajak dan auditor internal:

1. Kantor Akuntan Publik

Kantor Akuntan Publik bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh semua perusahaan terbuka, kebanyakan perusahaan lain yang cukup besar, dan banyak perusahaan serta organisasi nonkomersial yang lebih kecil. Sebutan kantor akuntan publik mencerminkan fakta bahwa auditor yang menyatakan pendapat audit atas laporan keuangan harus memiliki lisensi sebagai akuntan publik. Kantor Akuntan Publik sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

1. Auditor Internal Pemerintah

Auditor internal pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), guna melayani kebutuhan pemerintah.

1. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan

Auditor badan pemeriksa keuangan adalah auditor yang bekerja untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, badan yang didirikan berdasarkan konstitusi Indonesia.

1. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni bersifat audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

1. Auditor Internal

Auditor internal dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen, sama seperti BPK mengaudit untuk DPR.

1. **Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)**

Berikut ini adalah sepuluh standar audit yang berlaku umum (Arens, Elder, dan Beasley, 2015:42):

**Standar Umum**

1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor.
2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
3. Auditor harus menerapkan kemahiran profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.

**Standar Pekerjaan Lapangan**

1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan.
3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan inspeksi, observasi, tanya-jawab, dan konfirmasi agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan keuangan yang diaudit.

**Standar Pelaporan**

1. Laporan harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).
2. Laporan harus mengidentifikasikan keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan dianggap sudah memadai, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam laporan auditor.
4. Laporan harus berisi pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau asersi bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan. Jika tidak dapat menyatakan satu pendapat secara keseluruhan, auditor harus menyatakan alasan-alasan yang mendasarinya. Dalam semua kasus, jika nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan itu harus dengan jelas menunjukkan sifat pekerjaan auditor, jika ada, serta tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor.
5. **Kode Etik Profesi Akuntan Publik**

Salah satu misi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) adalah untuk menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional. Sehubungan dengan hal tersebut, IAPI telah memberikan tanggung jawab kepada Dewan Standar Profesional Akuntan Publik IAPI untuk mengembangkan dan menetapkan suatu standar profesi dan kode etik profesi yang berkualitas yang berlaku bagi profesi akuntan publik di Indonesia (SPAP, 2011).

Dalam SPAP (2011:1), kode etik profesi akuntan publik terdiri dari dua bagian, yaitu:

1. Prinsip dasar etika profesi dan memberikan kerangka konseptual untuk penerapan prinsip:
2. Prinsip Integritas

Prinsip integritas mewajibkan setiap praktisi untuk tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan hubungan bisnisnya. Praktisi tidak boleh terkait dengan laporan, komunikasi, atau informasi lainnya yang diyakininya terdapat kesalahan yang material atau pernyataan yang menyesatkan, pernyataan atau informasi yang diberikan secara tidak hati-hati, dan penghilangan atau penyembunyian yang dapat menyesatkan atas informasi yang seharusnya diungkapkan.

1. Prinsip Objektivitas

Prinsip objektivitas mengharuskan praktisi untuk tidak membiarkan subjektivitas, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak layak dari pihak-pihak lain memengaruhi pertimbangan profesional atau pertimbangan bisnisnya. Praktisi mungkin dihadapkan pada situasi yang dapat mengurangi objektivitasnya. Karena beragamnya situasi tersebut, tidak mungkin untuk mendefinisikan setiap situasi tersebut. Setiap praktisi harus menghindari setiap hubungan yang bersifat subjektif atau yang dapat mengakibatkan pengaruh yang tidak layak terhadap pertimbangan profesionalnya.

1. Prinsip Kompetensi serta Sikap Kecermatan dan Kehati-hatian Profesional

Prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mewajibkan setiap praktisi untuk memelihara pengetahuan dan keahlian profesional yang dibutuhkan untuk menjamin pemberian jasa profesional yang kompeten kepada klien atau pemberi kerja, dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan saksama sesuai dengan standar profesi dan kode etik profesi yang berlaku dalam memberikan jasa profesionalnya. Pemberian jasa profesional yang kompeten membutuhkan pertimbangan yang cermat dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional. Pemeliharaan kompetensi profesional membutuhkan kesadaran dan pemahaman yang berkelanjutan terhadap perkembangan teknis profesi dan perkembangan bisnis yang relevan. Pengembangan dan pendidikan profesional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara kemampuan praktisi agar dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten dalam lingkungan profesional. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu, sesuai dengan persyaratan penugasan. Setiap praktisi harus memastikan tersedianya pelatihan dan penyeliaan yang tepat bagi mereka yang bekerja di bawah wewenangnya dalam kapasitas profesional.

1. Prinsip Kerahasiaan

Prinsip kerahasiaan mewajibkan setiap praktisi untuk tidak melakukan tindakan, mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis kepada pihak di luar KAP atau jaringan KAP tempatnya bekerja tanpa ada wewenang khusus, kecuali jika terdapat kewajiban untuk mengungkapkannya sesuai dengan ketentuan hukum atau peraturan lainnya yang berlaku; Menggunakan informasi yang bersifat rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga.

1. Prinsip Perilaku Profesional

Prinsip perilaku profesional mewajibkan setiap praktisi untuk mematuhi setiap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, serta menghindari setiap tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Hal ini mencakup setiap tindakan yang dapat mengakibatkan terciptanya kesimpulan yang negatif oleh pihak ketiga yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, yang dapat menurunkan reputasi profesi.

1. Aturan etika profesi yang memberikan ilustrasi mengenai penerapan kerangka konseptual pada situasi tertentu:
2. Ancaman dan Pencegahan

Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi. Beberapa klasifikasi ancaman tersebut adalah:

1. Ancaman kepentingan pribadi, seperti kepentingan keuangan pada klien, ketergantungan pada jumlah imbalan jasa profesional yang diperoleh dari klien.
2. Ancaman telaah pribadi, seperti penemuan kesalahan yang signifikan ketika dilakukan pengevaluasian kembali hasil pekerjaan praktisi.
3. Ancaman advokasi, seperti mempromosikan saham suatu entitas yang efeknya tercatat di bursa (emiten) yang merupakan klien audit laporan keuangan.
4. Ancaman kedekatan, seperti anggota tim perikatan merupakan anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekat dari direktur atau pejabat klien.
5. Ancaman intimidasi, seperti ancaman atas pemutusan perikatan atau penggantian tim perikatan.

Pencegahan yang dapat menghilangkan ancaman tersebut atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Pencegahan yang dibuat oleh profesi, perundang-undangan, atau peraturan.
2. Pencegahan dalam lingkungan kerja, mencakup pencegahan pada tingkat institusi dan pada tingkat perikatan.
3. Pencegahan pada tingkat institusi, contohnya: Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang menekankan pentingnya kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi, Kepemimpinan KAP atau Jaringan KAP yang memastikan terjaganya tindakan untuk melindungi kepentingan publik oleh anggota tim *assurance*.
4. Pencegahan pada tingkat perikatan, contohnya: Melakukan konsultasi dengan pihak ketiga yang independen, seperti komisaris independen, organisasi profesi, atau praktisi lainnya.
5. Penunjukan Praktisi, KAP, atau Jaringan KAP

Sebelum menerima suatu klien baru, setiap praktisi harus mempertimbangkan profesi terjadinya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang diakibatkan oleh diterimanya klien tersebut. Setiap praktisi hanya boleh memberikan jasa profesionalnya jika memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan tersebut. Sebelum meneima perikatan, setiap praktisi harus mempertimbangkan setiap ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi yang dapat terjadi dari diterimanya perikatan tersebut.

1. Benturan Kepentingan

Setiap praktisi harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi setiap situasi yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, karena situasi tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Ancaman terhadap objektivitas atau kerahasiaan dapat terjadi ketika praktisi memberikan jasa profesional untuk klien-klien yang kepentingannya saling berbenturan atau kepada klien-klien yang sedang saling berselisih dalam suatu masalah atau transaksi.

1. Pendapat Kedua

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika dapat terjadi ketika praktisi diminta untuk memberikan pendapat kedua (*second opinions*) mengenai penerapan akuntansi, auditing, pelaporan, atau standar atau prinsip lain untuk keadaan atau transaksi tertentu oleh, atau untuk kepentingan, pihak-pihak selain klien. Signifikansi ancaman akan tergantung dari kondisi yang melingkupi permintaan pendapat kedua, serta seluruh fakta dan asumsi lain yang tersedia yang terkait dengan pendapat profesional yang diberikan.

1. Imbalan Jasa Profesional dan Bentuk Remunerasi Lainnya

Dalam melakukan negosiasi mengenai jasa profesional yang diberikan, praktisi dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai. Fakta terjadinya jumlah imbalan jasa profesional yang diusulkan oleh praktisi yang satu lebih rendah dari praktisi yang lain bukan merupakan pelanggaran terhadap kode etik profesi. Akan tetapi, ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat saja terjadi dari besaran imbalan jasa profesional yang diusulkan.

1. Pemasaran Jasa Profesional

Ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terjadi ketika praktisi mendapatkan suatu perikatan melalui iklan atau bentuk pemasaran lainnya. Setiap praktisi tidak boleh mendiskreditkan profesi dalam memasarkan jasa profesionalnya. Mereka juga harus bersikap jujur dan tidak boleh melakukan tindakan-tindakan seperti pembuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh atau membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung bukti terhadap hasil pekerjaan praktisi lain.

1. Penerimaan Hadiah atau Bentuk Keramahtamahan Lainnya

Praktisi maupun anggota keluarga langsung atau anggota keluarga dekatnya mungkin saja ditawari suatu hadiah atau bentuk keramahtamahan lainnya (*hospitality*) oleh klien. Penerimaan pemberian tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi terutama dalam hal objektivitas praktisi.

1. Penyimpanan Aset Milik Klien

Setiap praktisi tidak boleh mengambil tanggung jawab penyimpanan uang atau aset lainnya milik klien, kecuali jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku dan jika demikian, praktisi wajib menyimpan aset tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

1. Objektivitas Semua Jasa Profesional

Setiap praktisi harus mempertimbangkan ada tidaknya ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas yang dapat terjadi dari adanya kepentingan dalam, atau hubungan dengan, klien maupun direktur, pejabat, atau karyawannya. Sebagai contoh, ancaman kedekatan terhadap kepatuhan pada prinsip dasar objektivitas dapat terjadi dari hubungan keluarga, hubungan kedekatan pribadi, atau hubungan bisnis.

1. Independensi dalam Perikatan *Assurance*

Dalam melaksanakan perikatan *assurance*, kode etik ini mewajibkan anggota tim *assurance*, KAP, dan jika relevan, jaringan KAP, untuk bersikap independen terhadap klien *assurance* sehubungan dengan kapasitas mereka untuk melindungi kepentingan publik.

1. **Kecurangan (Fraud)**

Menurut *International Standards on Auditing* (ISA) seksi 240 *fraud* didefinisikan sebagai:

“Tindakan yang disengaja oleh anggota manajemen perusahaan, pihak yang berperan dalam *governance* perusahaan, karyawan atau pihak ketiga yang melakukan pembohongan atau penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil atau ilegal.”

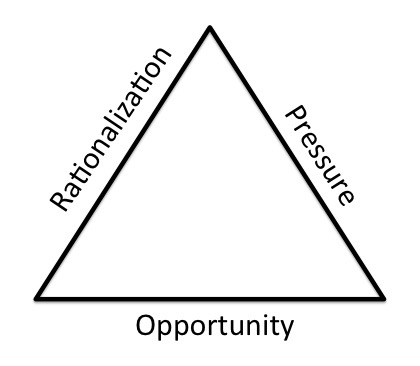
*Association of Certified Fraud Examiners* (*ACFE-2000*) mengkategorikan kecurangan ke dalam tiga kelompok (*fraud tree*), yaitu (Amrizal, 2004):

1. *Corruption* (korupsi), korupsi menurut ACFE, terbagi dalam pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), suap (*bribery*), pemberian ilegal (*illegal gratuity*), dan pemerasan (*economic exortion*).
2. *Fraudulent Statements* (Kecurangan laporan keuangan), kecurangan ini didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material laporan keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat finansial maupun non-finansial.
3. *Asset misappropriation* (penyalahgunaan aset), penyalahgunaan aset dapat digolongkan ke dalam kecurangan kas dan kecurangan atas persediaan dan aset lainnya, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (*fraudulent disbursement*).

Terdapat tiga kondisi yang menyebabkan kecurangan, yang dinamakan dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) antara lain (Arens, Elder, dan Beasley, 2015:398):

**Gambar 2.1**

**Segitiga Kecurangan (*Fraud Triangle*)**



Sumber: Arens, Elder, dan Beasley (2015)

1. *Opportunity* (kesempatan). Situasi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan.
2. *Pressure* (tekanan). Manajemen atau pegawai lainnya memiliki insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan.
3. *Rationalization* (rasionalisasi). Adanya suatu sikap, karakter, atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan melakukan perilaku yang tidak jujur tersebut.
4. **Kemampuan Dalam Mendeteksi Kecurangan**

Kemampuan mendeteksi kecurangan adalah sebuah kecakapan atau keahlian yang dimiliki auditor untuk menemukan indikasi mengenai *fraud*. Menurut Anggriawan (2014), kemampuan mendeteksi kecurangan berarti proses menemukan atau menentukan suatu tindakan ilegal yang dapat mengakibatkan salah saji dalam pelaporan keuangan yang dilakukan secara sengaja. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan adalah dengan melihat tanda, sinyal atau *red flags* suatu tindakan yang diduga menyebabkan atau potensial menimbulkan kecurangan. Secara garis besar, tanda-tanda yang digunakan untuk mengindikasikan kecurangan dibagi menjadi dua yaitu tanda-tanda kecurangan yang berasal dari dalam dan luar perusahaan. Tanda-tanda yang berasal dari dalam perusahaan meliputi penyimpangan pemakaian produksi yang ditunjukkan oleh beberapa laporan produksi yang telah diubah, pengubahan catatan untuk menyembunyikan transaksi ilegal, penghilangan catatan-catatan yang dapat membuktikan terjadinya manipulasi, dan lain-lain. Sedangkan tanda-tanda kecurangan yang berasal dari luar perusahaan meliputi kelebihan pembebanan jasa dan bahan, tagihan yang salah dikirimkan ke perusahaan yang salah akibat pemalsuan faktur, kekurangan bukti pendukung untuk suatu pembayaran barang dan jasa, dan lain-lain.

Auditor dapat gagal dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi atau bahkan setelah mengetahui adanya kecurangan tersebut, auditor ikut terlibat dalam menyembunyikan kecurangan tersebut. Sikap minimal yang harus dipertahankan auditor sesuai dengan standar umum profesinya, yaitu sikap kompetensi, independensi, dan profesionalisme (SPKN, 2007).

Berikut ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pendeteksian Kecurangan (Masrizal, 2010), yaitu:

1. Memenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan
2. Kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan
3. Melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan merugikan pihak lain
4. **Pengetahuan Auditor**

Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki oleh seseorang dalam profesi yang dijalaninya, termasuk profesi sebagai akuntan publik. Kushasyandita dan Januarti (2012), auditor harus menjalani pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup dalam praktik akuntansi dan teknik auditing sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan tepat.

Menurut Mardisar dan Sari (2007), pengetahuan audit diartikan dengan tingkat pemahaman auditor terhadap sebuah pekerjaan, secara konseptual atau teoritis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan merupakan unsur penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor independen untuk bekerja sebagai tenaga profesional. Sifat-sifat profesional adalah kondisi-kondisi kesempurnaan teknik yang dimiliki seseorang melalui latihan dan belajar selama bertahun-tahun yang berguna untuk mengembangkan teknik tersebut, dan keinginan untuk mencapai kesempurnaan dan keunggulan dibandingkan rekan sejawatnya.

Berikut ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengetahuan Auditor (Masrizal, 2010), yaitu:

1. Tingkat pendidikan
2. Pelatihan yang dimiliki
3. Keahlian dalam melaksanakan tugas secara cekat, cepat dan tepat
4. **Pengalaman Auditor**

Pengalaman merupakan faktor yang menunjang bagi setiap individu maupun kelompok dalam bidang pekerjaan yang digeluti. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh, maka semakin meningkat pula keahlian yang dimiliki seseorang. Penggunaan pengalaman didasarkan pada asumsi bahwa tugas yang dilakukan secara berulang-ulang memberikan peluang untuk belajar melakukannya dengan yang terbaik.

Beberapa definisi berikut akan memberikan penjelasan tentang pengalaman itu sendiri, antara lain:

Sucipto (2007), mengungkapkan bahwa pengalaman merupakan:

“pengetahuan atau keahlian yang diperoleh dari suatu peristiwa melalui pengamatan langsung maupun berpartisipasi dalam peristiwa tersebut. ”

Singgih dan Bawono (2010), mengungkapkan bahwa pengalaman merupakan:

“Suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non-formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi.”

Akram, Inapty dan Sukriah (2009), menyatakan bahwa seorang karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan memiliki keunggulan dalam beberapa hal diantaranya:

1. Mendeteksi kesalahan
2. Memahami kesalahan
3. Mencari penyebab munculnya kesalahan

Herliansyah (2006), menemukan bahwa pengalaman audit yang dipunyai auditor ikut berperan dalam menentukan pertimbangan (*judgement*) yang diambil sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

Berikut ini indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pengalaman Auditor (Masrizal, 2010), yaitu:

1. Lamanya bekerja sebagai auditor
2. Banyaknya penugasan yang telah diselesaikan
3. Jenis perusahaan yang telah ditangani
4. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nama Peneliti | Noviyani dan Bandi |
|  | Judul Penelitian | Pengaruh Pengalaman Dan Pelatihan Terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan |
|  | Tahun Penelitian | 2002 |
|  | Variabel Penelitian | Pengalaman (X1)  Pelatihan (X2)  Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan (Y) |
|  | Hasil Penelitian | Variabel Pengalaman berpengaruh positif terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan  Variabel Pelatihan tidak berpengaruh signifikan terhadap Struktur Pengetahuan Auditor Tentang Kekeliruan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nama Peneliti | Masrizal |
|  | Judul Penelitian | Pengaruh Pengalaman Dan Pengetahuan Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah |
|  | Tahun Penelitian | 2010 |
|  | Variabel Penelitian | Pengalaman (X1)  Pengetahuan (X2)  Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (Y) |
|  | Hasil Penelitian | Variabel Pengalaman dan Pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Nama Peneliti | Anton Kurniawan, Endar Pituringsih dan Alamsyah |
|  | Judul Penelitian | Pengaruh Pengetahuan, Pengalaman, Skeptisme Profesional Dan Intuisi Dalam Mendeteksi Ketidaktaatan |
|  | Tahun Penelitian | 2015 |
|  | Variabel Penelitian | Pengetahuan (X1)  Pengalaman (X2)  Skeptisme Profesional (X3)  Intuisi (X4)  Mendeteksi Ketidaktaatan (Y) |
|  | Hasil Penelitian | Variabel Pengalaman, Skeptisme Profesional, dan Institusi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam Mendeteksi Ketidaktaatan  Variabel Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam Mendeteksi Ketidaktaatan |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Nama Peneliti | Dina Purnamasari dan Erna Hernawati |
|  | Judul Penelitian | Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan, dan Perilaku Disfungsional Terhadap Kualitas Audit |
|  | Tahun Penelitian | 2013 |
|  | Variabel Penelitian | Etika Auditor (X1)  Pengalaman (X2)  Pengetahuan (X3)  Perilaku Disfungsional (X4)  Kualitas Audit (Y) |
|  | Hasil Penelitian | Variabel Etika Auditor, Pengalaman, Pengetahuan, dan Perilaku Disfungsional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5 | Nama Peneliti | Eko Ferry Anggriawan |
|  | Judul Penelitian | Pengaruh Pengalaman Kerja, Skeptisme Profesional, dan Tekanan Waktu Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* |
|  | Tahun Penelitian | 2014 |
|  | Variabel Penelitian | Pengalaman Kerja (X1)  Skeptisme Profesional (X2)  Tekanan Waktu (X3)  Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* (Y) |
|  | Hasil Penelitian | Variabel Pengalaman Kerja dan Skeptisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*  Variabel Tekanan Waktu tidak berpengaruh terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud* |

1. **Kerangka Pemikiran**
2. **Pengaruh pengetahuan auditor terhadap pendeteksian kecurangan**

Pengetahuan auditor sangat berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Seorang auditor yang memiliki wawasan yang luas, tingkat pendidikan yang tinggi, serta ilmu dan pelatihan yang dimiliki selama menjadi auditor merupakan dasar yang digunakan dalam melakukan audit untuk melacak adanya temuan kecurangan. Tingkat pengetahuan yang dimiliki auditor merupakan hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masrizal (2010) bahwa pengetahuan auditor berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian kecurangan. Pengetahuan auditor berpengaruh besar terhadap pendeteksian kecurangan karena dengan pengetahuan yang cukup dimilikinya, auditor akan lebih mampu dan cepat dalam melakukan langkah-langkah audit untuk mencari setiap hal atau permasalahan yang kritis menjadi modus kecurangan atau penyimpangan. Dengan tingkat pengetahuan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang auditor, auditor tidak hanya akan bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan audit secara efektif tetapi juga akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal.

1. **Pengaruh pengalaman auditor terhadap pendeteksian kecurangan**

Pengalaman auditor sangat berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Pengalaman yang dimiliki oleh auditor akan sangat membantu auditor dalam melaksanakan pekerjaan. Auditor yang berpengalaman tidak hanya memiliki kemampuan untuk menemukan kecurangan tetapi juga auditor tersebut dapat memberikan penjelasan yang lebih akurat dibanding auditor yang kurang pengalaman.

Pengalaman kerja seorang auditor menyangkut lamanya bekerja menjadi auditor, banyaknya penugasan yang telah diselesaikan, dan banyaknya jenis perusahaan yang ditangani. Semakin lama seseorang menjadi auditor, semakin banyak penugasan yang ditangani dan semakin banyak jenis perusahaan yang ditangani maka dapat dikatakan auditor tersebut semakin berpengalaman, pengalaman tersebut akan meningkatkan kesadaran auditor jika terjadi kecurangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviyani dan Bandi (2002) menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara pengalaman auditor dengan pendeteksian kecurangan. Semakin berpengalaman auditor maka akan semakin tinggi tingkat pendeteksian kecurangan. Auditor yang berpengalaman juga akan lebih paham terkait penyebab kekeliruan yang terjadi, apakah karena murni kesalahan baik manusia atau alat ataukah kekeliruan karena kesengajaan yang berarti *fraud*.

1. **Kerangka Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang terdiri dari satu variabel dependen (Pendeteksian Kecurangan) dan dua variabel independen (Pengetahuan dan Pengalaman Auditor). Gambar 2.2 berikut ini adalah kerangka model pengujian hipotesis:

**Gambar 2.2**

**Model Penelitian**

Pengetahuan Auditor

Pendeteksian Kecurangan

Pengalaman Auditor

1. **Hipotesis Penelitian**

Ha1 : Pengetahuan Auditor berpengaruh positif terhadap Pendeteksian Kecurangan.

Ha2 : Pengalaman Auditor berpengaruh positif terhadap Pendeteksian Kecurangan.